



Website: <https://journal.yasinta.org/index.php/elmustadrak>

DOI: <http://dx.doi.org/10.21093/elmustadrak>

P-ISSN: | E-ISSN:

Siyasah Wasathiyah: Jalan Moderasi dalam Politik Indonesia Perspektif Al-Quran

Fiki Oktama Putra¹, & Gusnanda^{2*}

¹²Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

email: ¹oktamaputrafiki@gmail.com, ² gusnanda@uinib.ac.id

***Corresponding Author**

Submitted: 2025-05-02	Revised: 2025-05-13	Accepted: 2025-05-22	Published: 2025-05-30
-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

Abstract : Political polarization in Indonesia has been escalating due to the rise of identity politics in electoral contests. This phenomenon threatens social stability and erodes democratic values. In this context, *siyasah wasathiyah*, or moderate politics, emerges as a relevant concept to address extreme political polarization. This study aims to analyze the urgency of applying *siyasah wasathiyah* in Indonesia's electoral politics from the perspective of the Qur'an. Using a qualitative research method and a literature review approach, this study explores Qur'anic verses related to political moderation and examines the implementation of this concept in Indonesia's political system. The findings indicate that *siyasah wasathiyah* promotes the principles of balance, justice, and unity, which, if applied in electoral politics, can reduce polarization and foster a more harmonious democracy. This concept rejects all forms of extremism and encourages collaboration among key stakeholders, including political actors, religious scholars, and civil society. Therefore, strengthening *siyasah wasathiyah* in political policies and the education system is crucial to shaping inclusive and moderate leadership in Indonesia. This study is expected to provide both conceptual and practical contributions to building a more stable and civilized political system.

Keywords: democracy; *siyasah wasathiyah*; The Quranic Concept of Moderate Politics; political polarization; electoral politics.

Abstrak : Polarisasi politik di Indonesia semakin meningkat akibat penggunaan politik identitas dalam kontestasi elektoral. Fenomena ini tidak hanya mengancam stabilitas sosial tetapi juga menggerus nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks ini, *siyasah wasathiyah* atau politik moderat menjadi konsep yang relevan untuk mengatasi polarisasi politik yang ekstrem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan *siyasah wasathiyah* dalam politik elektoral Indonesia berdasarkan perspektif Al-Qur'an. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini mengeksplorasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan moderasi politik serta mengkaji implementasi konsep tersebut dalam sistem politik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *siyasah wasathiyah* menekankan prinsip keseimbangan, keadilan, dan persatuan, yang jika diterapkan dalam politik elektoral dapat meredam polarisasi serta memperkuat demokrasi yang harmonis. Konsep ini menolak segala bentuk ekstremisme dan mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti aktor politik, ulama, dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, penguatan *siyasah wasathiyah* dalam kebijakan politik dan sistem pendidikan menjadi hal yang mendesak guna membentuk karakter kepemimpinan yang inklusif dan moderat di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam membangun sistem politik yang lebih stabil dan berkeadaban.

Kata Kunci: demokrasi; *siyasah wasathiyah*; konsep Al-Quran tentang politik moderat; polarisasi politik; politik elektoral.

PENDAHULUAN

Politik identitas telah menjadi fenomena yang menonjol dalam dinamika politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam dua dekade terakhir, politik elektoral di Indonesia sering kali diwarnai oleh eksploitasi identitas agama dan etnis, yang berkontribusi terhadap meningkatnya polarisasi di tengah masyarakat (Al-Farisi, 2020; Hariyanto dkk., 2025). Praktik ini tidak hanya merusak tatanan demokrasi yang sehat, tetapi juga berpotensi menciptakan instabilitas sosial dan politik (Ardipandanto, 2020; D. Lestari, 2019). Tingginya tensi politik identitas sering kali berkorelasi dengan menurunnya indeks demokrasi serta meningkatnya sentimen intoleransi di kalangan masyarakat (Democracy Index 2023, 2023).

Dalam studi yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa hampir 40% pemilih di Indonesia cenderung menentukan pilihan politik mereka berdasarkan faktor identitas ketimbang rekam jejak dan kapabilitas kandidat (Dinamika Politik Identitas di Pemilu Indonesia, 2023). Selain itu, indeks toleransi politik Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana dilaporkan oleh Setara Institute, yang mencatat bahwa ujaran kebencian berbasis SARA semakin meningkat dalam ruang publik dan media sosial selama periode kampanye pemilu (Laporan Indeks Toleransi Politik Indonesia, 2022).

Hasil studi di atas mengindikasikan adanya pergeseran dalam praktik demokrasi Indonesia dari yang seharusnya berbasis nilai-nilai kebangsaan dan kebersamaan menjadi semakin eksklusif dan berbasis polarisasi identitas. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana konsep *siyasah wasathiyah* (politik moderat) dalam perspektif Al-Qur'an dapat memberikan solusi bagi polarisasi politik yang semakin tajam di Indonesia? Kemudian bagaimana konsep ini dapat diimplementasikan dalam praktik politik elektoral untuk menciptakan tatanan demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *siyasah wasathiyah* dalam perspektif Al-Qur'an dan bagaimana prinsip-prinsipnya dapat diterapkan dalam politik elektoral di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis penyebab utama munculnya polarisasi politik berbasis identitas di Indonesia serta dampaknya terhadap stabilitas demokrasi dan kehidupan sosial. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan solusi berbasis *siyasah wasathiyah* yang dapat menjadi pendekatan alternatif dalam menciptakan praktik politik yang lebih moderat, adil, dan inklusif. Kajian tentang isu ini sudah dikaji para peneliti, terutama dari aspek agama (Ihsan & Nurhayati, 2020; D. Lestari, 2019; Rahman, 2020; Saputro, 2018), sosial (Nawawi, 2019; Wahdini, 2020), ekonomi (Nugraha, 2018; Rahman, 2013), budaya (Idham & Pranowo, 2020; Jubba dkk., 2021; Sajiwa dkk., 2022). Sementara dari aspek pendekatan Al-Quran dan tafsir belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan *siyasah wasathiyah* yang dikaji secara mendalam dalam perspektif Al-Qur'an dan implementasinya dalam konteks politik elektoral Indonesia. Dari sisi akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan mengenai *siyasah wasathiyah* dengan pendekatan berbasis Al-Qur'an, yang selama ini masih jarang dikaji secara mendalam dalam konteks politik elektoral Indonesia. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, aktor politik, serta masyarakat sipil dalam menerapkan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan politik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya meredam polarisasi politik dan membangun tatanan demokrasi yang lebih harmonis dan berkeadaban di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Sumber data utama penelitian ini diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan konsep *siyasah wasathiyah*. Teknik pengumpulan ayat menggunakan kerangka tafsir tematis korelatif dengan memanfaatkan *Mu'jam Li AlFaazhi Al-Quran*. Sementara itu, data pendukung diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan artikel yang membahas moderasi politik di Indonesia.

Studi kepustakaan menjadi teknik utama dalam pengumpulan data, dengan menelaah sumber-sumber ilmiah yang mendukung kajian ini. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai *siyasah wasathiyah* sebagai alternatif dalam membangun demokrasi yang lebih moderat dan inklusif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas dan Tantangan Moderasi Politik di Indonesia

Politik Indonesia didirikan atas dasar keragaman etnis, ras, budaya dan agama.(Yunus dkk., 2023) Fakta ini salah satu yang mendukung praktek politik identitas di Indonesia. Politik identitas sendiri merupakan cara berpolitik yang didasarkan kepada persamaan identitas kelompok tertentu, seperti suku, agama, ras dan budaya.(Andre Pebrian Perdana & Muslih, 2023) Dalam peta politik identitas di Indonesia terbagi kedalam 2 fraksi, yaitu kalangan agamis dan nasionalis.(Rambe & Mayasari, 2022) Kelompok (kiri) *nasionalis-sekuler* menolak konsep integrasi antara agama dan negara, sementara kelompok (kanan) *agamis* mendukung integrasi relasi agama dan negara dalam konsep politiknya.(Kholil, 2022) Spektrum politik yang tidak stabil antara keduanya disebabkan oleh konspirasi yang diciptakan oleh masing-masing elit politik mereka.(Y. S. Lestari, 2018)

Dalam percaturan politik di Indonesia, agama merupakan wilayah terseksi untuk dieksploitasi(Hamdi, 2017) oleh gerakan-gerakan politik berbasis keagamaan, khususnya Islam. Seperti PKB dengan basis NU, PPP, PKS, PBB,(Lay, 2006) Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Manuver politik sektarian yang mengkapitalisasi identitas agama telah menodai nalar politik masyarakat.(Kemenag, 2019) Misalnya, demonstrasi terhadap Israel yang di promotori PKS.(Rahawarin, 2022) Gerakan ini terjadi sebelum konstelasi demokrasi tahun 2024, dalam kegiatan *Global Day* PKS suarakan aksi solidaritas Palestina.(PKS, 2024) Disamping menyuarakan aspirasi dan suara perlawanan pro-palestine, kegiatan ini membuat kita bertanya-tanya, apakah ini media yang digunakan untuk mengait suara umat Islam Indonesia?. Karena ketika itu PKS mengusung Anis Baswedan kandidat Capres 2024.

Disisi lain, munculnya identitas nasionalis sebagai anti-tesis dari kelompok agamis. Kelompok ini berusaha menghadirkan spirit nasionalisme, patriotik,(Febriansyah dkk., 2022) pluralisme dan nilai-nilai kebangsaan untuk menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa.(Latief, 2017) Internal partai politik yang menggunakan identitas ini, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berideologi *nasionalisme-marhanisme*, Partai Sosialis Indonesia (PSI) ideologi *sosialisme-demokratis*.(Gerald, 2019) Polarisasi politik PDIP yang sangat rapi, terkenal dengan istilah *cover all-sides*. Dengan cara mendirikan sayap organisasi muslim sebagai pencitraan agar tidak dikatakan sebagai partai politik sekuler.(Anugerah, 2021)

PDI-P di identik dengan partai non-muslim, partai PKI, partai preman dan partai dengan ideologi ekstrem. BAMUSI (Baitul Muslimin Indonesia) sendiri merupakan upaya preventif PDI-P dan teknik manipulatif untuk menghilangkan stigma-stigma negatif kepada mereka. Bahkan BAMUSI banyak menarik perhatian umat islam, (Abon Ronaldi & Bakti, 2023) sekali lagi teknik politik yang luar biasa dilakukan oleh PDI-P. Isu diskriminasi terhadap kelompok minoritas merupakan dagangan politik kalangan nasionalis, perasaan tertindas datang dari kalangan ini menimbulkan kecemasan terhadap nasib kebinekaan di negeri ini. (Maarif, 2018) Landasan historis kesuksesan politik identitas kelompok nasionalis ini adalah ketika peleburan ego sektoral masing-masing kelompok berbeda untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. (Tutukansa, 2022) Cara berpolitik seperti tak obahnya dengan politisasi agama, sama-sama menemui jalan yang terjal dalam perkembangannya.

Dalam praktiknya, masing-masing aktor dari dua kubu besar ini mengkapitalisasi identitas untuk mendongrak elektabilitasnya. Akibat pemanfaatan identitas yang tidak sehat, sehingga menciptakan segregasi ditengah-tengah masyarakat. Misalnya, polarisasi agama tumbuh subur dan sangat berpengaruh dalam politik Indonesia, karena didukung oleh tradisi masyarakat *religion-centris*, segala hal dilihat berdasarkan paradigma agama. (Mu'ti, 2019)

Bukti masifnya politisasi agama dapat kita lihat dalam helatan Pilkada DKI Jakarta. Basuki Thaja Purnama dituding melakukan penistaan terhadap Al-Qur'an tahun 2017. Fenomena ini mengundang terjadinya kegaduhan di Jakarta, karena perlawanan dari umat Islam yang tidak menerima kitab sucinya dilecehkan. Lagi-lagi, isu ini mencuat di tengah-tengah publik ketika PILKADA DKI Jakarta 2017 berlansung. Habib Rizieq Shihab sebagai garda terdepan yang menyuarakan perlawanan terhadap Ahok menggunakan isu agama dan ras. (Sugiharto, 2017) Framing seagama menyumbang angka tertinggi memilih Anis-Sandi sebanyak 27,1%/40% dan yang penting jangan Ahok sebanyak 25,9%. Persentase ini menunjukkan komitmen yang diperlihatkan oleh umat Islam Ibu Kota sangat tinggi (Latief, 2017) dan PDIP pemenang Pilkada tidak ada gunanya dibandingkan framing politik identitas multikulturalisme. (Kewuel dkk., 2017) Akibat Pilkada DKI Jakarta, PDIP juga menelan kekalahan disejumlah provinsi lain. (Watihellu, 2019)

Kasus di atas kembali mencuat pada kontestasi demokrasi 2019, polarisasi menciptakan segregasi dan masyarakat terpecah kedalam dua kelompok yang tidak menemui titik integrasinya, kelompok *moderat* (Jokowi-Ahok) sedangkan kelompok *Radikal* (Prabowo-Sandi). (Karim, 2019) FPI, sebagai simpatisan kubu Prabowo-Sandi yang menyuarakan tagline *#2019gantipresiden* mengalami benturan dengan GP Anshor dari NU. (Mansyur, 2023) Konflik internal umat Islam ini terjadi, karena spektrum politik antara kedua kubu semakin memanas. Pasangan Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi sama-sama mendapatkan dukungan dari ulama. Kubu Jokowi-Amin, mayoritas mendapatkan dukungan dari masyarakat Jawa, khususnya masa NU, sedangkan kubu Prabowo-Sandi didukung oleh ulama seperti Abdul Shomad, Habib Rizieq Shihab, dll.

Tak hanya itu, ujaran kebencian, politisasi agama, dan paham *ekstrimisme* tumbuh subur ditengah-tengah masyarakat. (Aan Arizandy, 2019) Kanal media seperti You Tube dan Twitter dijadikan sebagai media propaganda, masing-masing pendukung diberikan label. Kelompok yang pro Jokowi-Amin dijuluki "*Cebong*", sementara kelompok pro Prabowo-Sandi dilabeli "*Kampret*". Penyematan branding oleh masing-masing kubu ini bertujuan untuk saling menjatuhkan dan mendiskrimasi. (Hayat & Nurhakki, 2022)

Fakta di atas menunjukkan peta perpolitikan nasional maupun lokal telah dinodai oleh praktik politik *konservatisme* dan *sekulerisme*. Realitas yang sangat memperihatinkan telah terjadi di bangsa ini, praktik politik tuna moral memobilisasi agama demi mencapai hasrat kepentingan, (Qorib, 2019) merusak stabilitas politik dan terjadinya konflik berkelanjutan di Indonesia. Data di atas menunjukkan, wajah moderasi politik di negeri belum mampu diimplementasikan dalam praktik politik elektoral. (Kewuel dkk., 2017) Karena gerakan politiknya tidak mencerminkan prinsip-prinsip moderasi, selalu bernuansa *tatharruf* (berlebihan), gerakan politik yang menimbulkan perpecahan dan konflik ditengah-tengah masyarakat. Akibat polarisasi ini, segregi antar masyarakat semakin terlihat, watak berpolitik masyarakat terbagi kedalam dua kecendrungan. Kalangan yang pro terhadap fraksi agamis-tradisionalis, cara berpolitiknya cenderung *konservatif* dan kelompok yang mendukung fraksi *nasionalis*, kecendrungan politiknya kearah sekularisme.

Mengurai Politik Identitas: Penyebab, Dampak dan Solusi

Secara konseptual, politik identitas seperti pisau bermata dua, adakala bernilai positif dan negatif. Positif, jika dalam praktiknya menghargai perbedaan, tanpa ada diskriminasi SARA, sebaliknya bernilai negatif jika bertolak belakang dengan konsep di atas. (Widjaja dkk., 2021) Namun, realita di Republik ini identitas politik di mobilisasi dengan cara yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip moderasi. Konfrontasi politik seperti ini telah mengganggu stabilitas politik nasional maupun lokal. Sehingga, praktik politik elektoral menampilkan wajah serba ekstrim, eksklusif, intoleran dan radikal, bahkan, republik sedang getol diserang terus menerus oleh arus deras radikalisme transnasional. (Aan Arizandy, 2019) Polarisasi didukung oleh karakter masyarakat mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah terprovokasi, (Al-Barbasy, 2022) semuanya dikapitalisasi elit masing-masing yang sarat akan popularitas. Kondisi ini menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia masih berada di taraf "*eksklusif*" atau "*transaksional*" belum mencapai predikat demokrasi "*transformasional*". (I Putu Sastra Wingarta dkk., 2021) Jika politisasi dan polarisasi terus-menerus dilakukan akan membawa petaka besar bagi bangsa, demokrasi dan pluralisme.

Ancaman Keutuhan dan Stabilitas Bangsa

Nada politik yang tuna moral membentuk polarisasi politik dan menciptakan segregi antar masyarakat, sehingga rakyat terpecah menjadi dua kubu besar. Genealogi politik identitas di dominasi oleh kubu agamis dan nasionalis. Isu agama sangat getol dimanfaatkan dalam praktik politik tanah air. Misalnya, konflik yang menimpa Basuki Thaja Purnama karena melecehkan al-Qur'an, berpengaruh terhadap Pilada DKI Jakarta 2017 hingga Pemilu 2019. (I Putu Sastra Wingarta dkk., 2021) Menjelang Pemilu tahun 2024, politisasi agama, intoleran, dan label-label bernuansa negatif lainnya masih getol dikampanyekan. (Yusuf & Hidayah, 2024) Tindakan Anis alih-alih melakukan kunjungan silaturahmi, meminta restu dan dukungan kepada ulama, (Suhendar, 2024) padahal tujuannya untuk mendongkrak elektabilitas. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hadir sebagai gerakan anti-tesis untuk menyudutkan Anis. Mulai dari Anis menjabat sebagai Gubernur DKI sampai selesai jabatan, terus dihujani kritikan dari kubu PSI. (Yusuf & Hidayah, 2024)

Jika konflik horizontal antar dua kubu yang saling berbenturan tak kunjung menemukan solusinya, akan menciptakan iklim politik dan interaksi sosial tidak harmonis.

Sesuai perkataan Prof. Mahfud MD “saat ini ancaman terhadap keutuhan bangsa semakin mengkhawatirkan karena politik identitas yang mengedapankan identitas agama menjadi semakin mengental”.(Setyawan, 2019) Bahkan politik identitas yang menggunakan baju agama, sampai-sampai mempersoalkan ideologi bangsa.(Al- Farisi, 2018) Kekhawatiran terhadap fenomena yang terjadi, karna polarisasi politik identitas yang di promotori oleh para pemangku kepentingan, tak ubahnya dengan politik *divide et empera* (pecah belah) yang digunakan untuk memecah belah bangsa Indonesia.(Al- Farisi, 2018) Konflik berkelanjutan sama-sama kita saksikan di Tanah Arab yang tak kunjung selesai. Antara Sunni vs Syi'ah dan Islam vs Yahudi, telah menelan banyak korban, mulai dari manusia, harta, dll. Disamping itu, konflik berkelanjutan juga dapat menghambat kemajuan bangsa. Seperti yang di sinyalir oleh Buya Syafi'i Ma'arif “Jangan karna gara-gara seorang Ahok dan penentangannya, lalu kemudian umat Islam dan seluruh warga bangsa tega mengorbankan kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia yang lagi susah”.(Aan Arizandy, 2019)

Intoleran

Faktor keagamaan merupakan salah satu aspek yang menyebabkan terjadinya intoleransi politik.(Zhafira, 2017) Tak jarang, antar umat beragama saling mengemukakan ujaran kebencian yang dapat mempengaruhi indeks toleransi politik.(Ghozali, 2019) Disetiap konteslasi demokrasi ujaran kebencian bernuansa SARA tumbuh subur ditengah-tengah masyarakat. Di Indonesia terdapat dua kubu yang tidak menemukan titik temunya, karena saling menonjolkan perbedaan dan saling menyudutkan hingga menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.(Khoirunnisa, 2023) Bahkan kelompok minoritas harus disingkirkan dalam pertarungan politik.(Khoirunnisa, 2023) Melalui isu etnis yang dihadirkan kepermukaan, antara pribumi vs non-pribumi atau agamis vs kafir.(Kewuel dkk., 2017) Polarisasi seperti ini akan memunculkan sebuah konsep identitas sosial dan pluralisme politik yang saling bergesekan dan saling bertolak belakang.(Tutukansa, 2022)

Fenomena di atas merupakan bentuk penggunaan identitas tertentu dalam praktik politik secara *ekstrem*. (Mohammad Iqbal Ahnaf, Samsul Arif, 2015) Hal ini menyebabkan terjadinya *eksklusivitas* antar kelompok, karena saling curiga dan kehadiran kelompok lain akan memberikan ancaman terhadap eksistensi kelompok mereka.(Muhammad Nur Rifqi Fuadi & Saloom, 2020) Sehingga, gerakan separatisme, ujaran kebencian, nada perlawanan akan selalu muncul dan tindak kekerasan dinormalisasi. Sikap seperti ini, akan meruntuhkan bangunan *destruktif pluralisme* bangsa dan disharmonisasi antar umat beragama.(Andre Pebrian Perdana & Muslih, 2023) Murad Hoffman didalam tesisnya menjelaskan, bahwa sikap anti terhadap pluralisme bukanlah cara berislam yang sehat(Maarif, 2010). Seperti FPI, HTI dan MMI berhasrat ingin menformulasikan syari'ah dalam kehidupan bernegara (sistem khilafah).(Maarif, 2010) Fenomena intoleransi politik yang gesit dilakukan umat Islam, sepertinya ada faktor mendasar yang melatarbelakanginya, tidak hanya keangkuhan ideologis saja melainkan dibarengi dengan agenda politik yang memobilisasi agama. (Al-Barbasy, 2022) Selaras dengan ini, kritikan Azyumardi Azra terhadap gagasan negara khilafah, Azra mengatakan sistim kekhalifahan tidak lagi sesuai dengan situasi global karna sudah terikat secara permanen dengan sistim bangsa-bangsa. Disamping itu, NKRI didirikan atas perdebatan panjang antara kaum nasionalis dengan kaum islamis(Al-Rasyid, 2019) dan konstruksi masyarakat yang heterogen.(Madjid, 1988) Murad Hoffman didalam tesisnya menjelaskan, bahwa sikap anti terhadap pluralisme bukanlah cara berislam yang sehat.(Maarif, 2010)

Distorsi Demokrasi Bangsa Memilukan

Menjaga dan merawat stabilitas demokrasi yang telah di rintis sejak reformasi 1998 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan. Namun, melihat realitas perkembangan demokrasi dewasa ini telah melahirkan berbagai bentuk distorsi dan paradoks yang memilukan. Permasalahan ini ditimbulkan akibat politik identitas dan polarisasi yang sangat tajam.(Iskandar & Octo, 2024) Politik identitas memantik munculnya gerakan separatisme yang mengancam stabilitas demokrasi bangsa.(Aan Arizandy, 2019) Karena mereka menganggap, kekalahan ini bentuk tindakan diskriminasi yang mengancam eksistensi kelompoknya. Sehingga menjadikan mereka tertutup dan defensive terhadap kelompok berbeda identitas.(Mohammad Iqbal Ahnaf, Samsul Arif, 2015)

Kasus Pemilu 2019 masih menyiratkan polarisasi politik dan politik identitas yang sangat tajam. Untuk memperoleh elektabilitas elektoral masing-masing paslon kerap menggunakan strategi yang ekstrim. Mendiskritkan label "*tidak islami*" oleh paslon 01 kepada paslon 02 atau jika mendukung paslon 01 diartikulasikan sebagai bentuk pengingkaran terhadap agama.(Iskandar & Octo, 2024) Kemudian, wacana formulasi *Islamic State* yang dikampanyekan oleh kelompok *politist Islamist*, menurutnya konsep negara ideal adalah menggunakan syari'at Islam.(Anam, 2019) Meminjam istilah Buya Syafi'i Ma'arif, "*bahwa tuhan telah dibajak demi kepentingan yang bernilai rendah*". Idealnya agama sebagai pembimbing moral manusia, telah disalahgunakan oleh elit yang tuna moral tersebut, menjadikan agama sebagai kendaraan yang sarat dengan berbagai hasrat dan kepentingan(Qorib, 2019).

Propaganda dan ujaran kebencian telah menciderai nilai-nilai demokrasi (Mansurni Abadi dkk., 2023) dan dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Prinsip-prinsip demokrasi tidak lagi diperhatikan, karena adanya intervensi terhadap rakyat dalam menentukan pilihannya berdasarkan identitas kelompok masing-masing. Elit publik telah mengkapitalisasi pluralisme untuk mendapatkan popularitas ditengah-tengah rakyat. Ini merupakan sebuah bukti, praktik demokrasi di negeri masih berada pada taraf prosedural, belum masuk keranah substansial. Demokrasi substansial menghormati dan menjamin seluruh hak kemanusiaan tersalurkan.(Aan Arizandy, 2019)

Moderasi Politik dalam Perspektif Al-Quran: Telaah *Siyasah Wasathiyah*

Selama ini konsep moderasi lebih cendrung berkutat seputar masalah fenomena umat beragama dan radikalisme atas nama agama. Pergeseran paradigma untuk mengaktualisasikan konsep moderasi lebih luas sudah seharusnya menjawab kepada konsep politik, wacana ini di istilahkan dengan *siyasah washathiyah*. *Siyasah washathiyah* adalah pola berpolitik yang menjunjung tinggi rasa persamaan, keadilan dan mengedepankan kemashlahatan untuk mencapai kepentingan bersama dan keluar dari polarisasi politik *ekstrimisme*.(Al-Barbasy, 2022) Tanpa adanya washathiyah dalam politik, mustahil akan tercapainya cita-cita mulia dari politik islam. Karna pemeluk agama lain juga akan melakukan hal yang sama dalam percaturan politik di Indonesia. (Bistara & Fuady, 2022)

Dalam peta moderasi politik di Indonesia harus mengaktualisasikan prinsip-prinsip kesetaraan, keseimbangan, keadilan dan persamaan berlandaskan al-Qur'an.(Halim dkk., 2022) Atas dasar itu, urgensi melihat paradigma al-Qur'an untuk mencerahkan konflik yang terjadi akibat polarisasi politik ini merupakan suatu keniscayaan. Supaya gagasan moderatisme al-Qur'an(Abdurrahman, 2022) dapat diserap dan diaplikasikan dalam kehidupan politik bangsa. Al-Qur'an tidak mengajarkan

sekularisasi atau radikalisme dalam berpolitik. Justru tercermin dalam perilaku nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan konflik peletakan batu hajar aswad di Ka'bah. Persengketaan internal kaum Quraisy menentukan siapa yang memindahkan batu tersebut. Nabi mengambil alih dan mempersatukan antara seluruh pihak bersengketa dengan cara mengambil sarung untuk meletakkan batu hajar aswad dan setiap ujungnya diangkat oleh semua pihak terlibat.(Nur, 2010)

Menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, Islam sangat menentang polarisasi politik melalui kekerasan dan politik kekuasaan. Namun, pola politik yang diajarkan Islam lebih mengedepankan nilai-nilai Islam itu sendiri. Bukan praktek politik yang menggunakan nama agama untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu. Nilai-nilai al-Qur'an menunjukkan sikap *inklusif* dan *dialogis*, (Ozi Setiadi, Anis Kurniawan, 2019) sebagaimana yang terdapat didalam QS. Al-Hujurat ayat 13. Didalam ayat ini secara gamblang menyebutkan istilah egaliterialisme, oleh karena itu Islam sebagai agama yang mendeklarasikan pesan-pesan persamaan dan keadilan bagi manusia. Karena manusia didalam pandangan Tuhan tidak ada stratifikasi, semuanya sama. Berdasarkan prinsip ini, al-Qur'an sangat mendukung gagasan persamaan.(Aan Arizandy, Amirullah, Andi Muslimim, Cici Situmorang, Destara Sati, 2018)

Siyasah Washathiyah dalam Al-Quran: Fondasi Politik Moderat

Konsep *siyasah wasathiyah* atau politik moderat merupakan ajaran fundamental dalam Islam yang berakar pada prinsip keseimbangan, keadilan, dan persatuan. Al-Qur'an menegaskan pentingnya sikap wasathiyah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan dan tata kelola politik. Sebagai agama yang mengajarkan rahmatan lil 'alamin, Islam menolak segala bentuk ekstremisme dan mendorong prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan politik. Dalam bagian ini, akan dielaborasi ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar konseptual *siyasah wasathiyah* serta relevansinya dalam konteks politik elektoral di Indonesia.

Al-Qur'an masih eksis dan dapat dijadikan sebagai pedoman pada saat sekarang ini merupakan wujud kekomprehensifan makna al-Qur'an. Misalnya dengan isu moderasi, terkhusus didalam penelitian ini dibahas tentang cara berpolitik moderat, al-Qur'an tidak mengajarkan sekularisasi atau radikalisme dalam berpolitik. Melainkan, cara berpolitik moderat merupakan sikap dalam berpolitik yang menjunjung tinggi rasa persamaan (kesetaraan), keadilan dan kemashlahatan. Dalam hal ini, al-Qur'an menjelaskan tentang konsep tersebut, sebagaimana yang terdapat didalam QS. Al-Hujurat ayat 143 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat : 13)

Hamka didalam tafsirnya Al-Azhar menjelaskan, manusia diciptakan berbagai macam bentuk rupa, warna kulit, suku dan bangsa, supaya antara satu sama lain saling

mengenal dan mengetahui. Yang paling penting dari ayat ini adalah meskipun berasal dari bangsa, suku dan ras yang berbeda, namun hakikatnya manusia berasal dari satu keturunan, yaitu Adam as. Oleh karena itu, tidak perlu mengungkit-ngungkit perbedaan melainkan melihat asal kejadian yang membangkitkan spirit persatuan. (Amrullah, 2019) Pesan ini menjadi teguran tersendiri bagi oleh politik yang mengkapitalisasi isu SARA dalam mencari popularitas.

Spirit yang dapat diambil dari ayat ini berupa, bahwasanya perbedaan suku, bangsa dan budaya merupakan suatu hal yang lumrah dan tidak perlu diperselisihkan lagi. Namun, bagi sekelompok orang, menjadikan ini sebagai media untuk memperoleh kepentingan politik mereka. Misalnya didalam ranah politik, di Indonesia sendiri politik kebangsaan sudah mulai pudar sehingga politik identitas tumbuh subur dalam politik nasional maupun lokal. Sehingga, sikap berpolitik seperti ini bukan memberikan dampak positif terhadap bangsa, melainkan bangsa semakin hancur.

Selain itu, konsep tentang *siyasah wasathiyah* direpresentasikan dengan sikap keseimbangan atau prinsip *tawazzun*. Salah satu ayat yang membicarakan masalah ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu ber kiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia."

Ayat ini mendeskripsikan tentang perilaku umat Yahudi dan Nasrani dalam mengerjakan sesuatu yang berat sebelah. Terlihat, umat Yahudi cenderung mementingkan kekayaan harta benda, sehingga perekonomian mereka penuh praktek riba. Sebaliknya, umat Nasrani lebih cenderung kearah dunia politis dalam kekuasaan. Kemudian, ayat ini menjadi pengingat bagi umat Muhammad supaya tidak sama dengan umat-umat sebelumnya. (Amrullah, 1971) Prof. Dr. Quraish Shihab menjelaskan, bahwa "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu wahai umat Islam ummatan washathan (pertengahan) moderat dan teladan". Posisi tengah memberikan pemahaman kepada kita, bahwasanya tidak berpihak kepada salah satu baik kanan maupun kiri. Artinya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip keseimbangan (*Tawazzun*). (Shihab, 2002) Lebih lanjut dijelaskan dalam tafsir Kemenag, karakteristik ummatan wasathan adalah bersikap adil dan menentang seluruh bentuk kebatilan. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011) Misi yang diijazahkan nabi Muhammad di Jazirah Arab adalah membangkitkan kembali gairah *ummatan wasathan* (umat pertengahan). Umat yang berpihak kepada keadilan, kemashlahatan dan kesetaraan, sebagai aktualisasi khalifah di permukaan bumi. (Amrullah, 1971).

Selanjutnya, jika politik moderat atau *siyasah washatiyah* dimaknai sebagai politik yang menjunjung tinggi nilai keadilan maka salah satu ayat yang menjelaskan pesan moral ini dapat diamati dalam surat Al-Maidah ayat 8, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Maidah : 8)

Secara defenitif, Quraish Shihab menjelaskan adil merupakan menempatkan sesuatu pada tempatnya.(Shihab, 2009) Adil, jujur dan ikhlas merupakan sikap yang harus diimplementasikan didalam kehidupan sehari-hari. Keadilan harus selalu dihadirkan disegala lini kehidupan, dalam penegakan hukum misalnya, supaya dalam menjatuhkan vonis hukum tepat sasaran.(Kemenag RI, 2010) Meskipun yang diadili adalah orang yang dibenci tetaplah perlakukan dengan adil. Jangan jadikan kebencian kepada lawan sebagai penghambat untuk menegakkan keadilan. Selalu menegakkan prinsip keadilan bertujuan untuk menjadikan hidup lebih tentram, aman dan harmonis.(Al-Qur'an, 2011).

Terakhir, *siyasah washatiyah* sebagai konsep gerakan politik yang diusung Al-Quran mesti menjunjung tinggi sikap inklusifitas dan toleran. Nilai-nilai ini tercermin dalam surat Ali-Imran ayat 64, sebagai berikut:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Artinya : “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim.” (QS. Ali-Imran : 64)

Quraish Shihab menyatakan maksud ayat ini berupa “kalau kalian berpaling dan menolak ajakan ini, maka saksikanlah dan akuilah bahwa kami adalah orang-orang muslim, yang akan melaksanakan secara teguh apa yang kami percayai”. Artinya, umat muslim menjalankan ritual keagamaan sesuai kepercayaannya, begitupun dengan umat agama lain. Ayat ini.(SHIHAB, 2002) Pengakuan eksistensi agama lain merupakan bentuk dari sikap inklusifitas ditengah arus pluralitas. Toleransi hanya sebatas dalam ranah sosial untuk menata konstruksi kehidupan harmonis, bukan dalam aspek keyakinan dan ritual keagamaan. Budaya toleransi yang masif diimplementasikan akan menghilangkan sikap diskriminasi berkaitan SARA.(A Ilyas Ismail, Abuddin Nata, 2021)

Meneguhkan *Siyasah wasathiyah* Dalam Praktik Politik Elektoral Indonesia

Wajah perpolitikan bangsa ini kian hari semakin memilukan, percaturan politik yang didasarkan atas pramatisme kelompok(Tjahjoko, 2015) bukan kepentingan bangsa.

Petaka konflik antara partai-partai dan polirasisasi politik masing-masing semakin kuat. Praktik politik tuna moral mengkapitalisasi identitas secara berlebihan berdampak mengancam keutuhan bangsa, stabilitas demokrasi, konflik SARA dan radikalisme tumbuh subur. Hal ini dilatarbelakangi oleh permasalahan politik, bukan faktor determinan agama. Agama hanya menjadi "*bumbu penyedap*" dalam gesekan polarisasi politik tersebut.(Al-Barbasy, 2022) Fenomena ini menjadi bukti bahwasanya wajah perpolitikan di Indonesia tidak mencerminkan prinsip-prinsip moderasi (*Siyasah Washathiyah*), bahkan semuanya berbau *tatharruf* (ekstrim). Praktik politik seperti ini juga tidak sesuai dengan prinsip politik yang terdapat didalam pancasila,(Al-Barbasy, 2022) yang mendambakan prinsip keadilan, kesejahteraan dan persatuan.

Melihat fenomena politik yang seperti ini, sudah saatnya wacana moderasi menjawab kearah politik. *Siyasah wasathiyah* harus masif dikampanyekan oleh berbagai *stake holder*. Seperti ormas-ormas, partai-partai yang berideologi islam maupun tidak. Supaya kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah, mengedepankan prinsip-prinsip moderasinya. Bukan keberpihakan kepada salah satu kelompok saja, untuk mendapatkan keuntungan semata. Dalam mengimplementasikan politik moderat ini bukanlah suatu hal yang mudah. Karena harus berhadapan dengan tradisi politik bangsa feodalisme, politik identitas yang sangat ekstrim dan pluralitas.(Silva, 2021) Oleh karena itu, dibutuhkan ikhtiar politik dari seluruh kalangan untuk mewujudkan wacana politik moderat di bangsa ini.(Al-Barbasy, 2022)

Ignes Kleden menuturkan urgensinya menghadirkan prinsip-prinsip moderasi didalam dunia politik. Supaya seluruh pemimpin publik memiliki prinsip moderasi didalam dirinya. Karena didalam kepemimpinannya, mereka akan menemukan perbedaan pendapat yang sangat banyak. Prinsip moderasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin akan mampu mengambil kebijakan yang adil berdasarkan seluruh aspirasi rakyat.(Ozi Setiadi, Anis Kurniawan, 2019) Indonesia di hadapkan kepada pluralitas agama dan aliran-aliran politik yang ikut mewarnai dinamika demokratisasi bangsa. Pelbagai macam konflik yang muncul dalam dunia politik disebabkan oleh perlakuan ketidakadilan didalam keputusan yang diambil. Seperti munculnya gerakan separatisme dari kalangan yang merasa dirugikan dan terdiskriminasi seperti HTI.(Arif, 2018)

Siyasah Washathiyah Sebagai Solusi

Melihat fenomena kelam yang sedang dihadapi bangsa, praktik politik elektoral serba ekstrim. Sehingga cita-cita bangsa sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi sering terabaikan karena konflik berkelanjutan. Oleh karena itu, ditengah krisis moral aktor politik diperlukan pencerahan untuk menyadarkan mereka kembali. Tulisan ini menawarkan konsep siyasah washathiyah sebagai solusi perpolitikan Indonesia menuju Indonesia moderat. *Pertama*. Menebar Ide-Ide Keadilan Untuk Semua. Salah satu pilar *siyasah washathiyah* adalah keadilan. Menurut John Rawls prinsip keadilan adalah *principle of Greatest Equal Liberty* baik dalam ruang lingkup politik maupun kebebasan berekspresi.(Damanhuri Fattah, 2013) Konsep keadilan politik, menjamin hak setiap warga negara untuk menentukan afiliasi politik, memilih dan mencalon kandidat politiknya.(*Hak dan keadilan dalam hubungan internasional* _3, t.t.) Kesetaraan tanpa diskriminasi berdasarkan popularitas, (Young, 1990) kebebasan dan pendistribusian hak-hak seluruh warga negara merupakan *instrument* untuk mewujudkan keadilan, (Young, 1990) tanpa hal itu mustahil keadilan akan terwujud.

Selaras dengan itu, Pancasila sebagai *way of life* juga menyampaikan hal yang sama, terdapat di sila ke-5, "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Darmodihardjo memaknai sila ke-5 ini sebagai bentuk representasi keadilan yang harus diberikan kepada warga negara meliputi keadilan ekonomi, sosial, politik, hukum dan kebudayaan. (Christian Siregar, 2014) Kemudian, sistem demokrasi sebagai panduan dalam bernegara harus diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Sistem demokrasi dilakukan tidak hanya sebagai prasyarat, melainkan demokrasi yang berkeadilan. Akhir-akhir ini Indonesia dihebohkan gejolak politik identitas yang tumbuh subur tak terbendung lagi. Polarisasi berdasarkan identitas tertentu dalam praktiknya telah mendiskriminasi hak-hak setiap warga negara dan mengikis keadilan. Oleh karena itu, penulis berharap praktik demokrasi yang harus dihadirkan ke permukaan adalah demokrasi yang berkeadilan dan menghargai perbedaan. Tanpa keadilan, sistem politik manapun tidak lebih dari panggung sandiwara yang mengatasnamakan rakyat.

Mencuatnya gerakan sporadis ekstrimis disebabkan oleh tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Kebijakan-kebijakan pemerintah hanya menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan penguasa dan merugikan lawan politiknya. Setiap kebijakan yang diambil selalu menuai kontroversi dan penentangan dari kelompok yang merasa dirugikan. Berdasarkan data dari CSRC, radikalisme disebabkan oleh ketidakpuasan warga negara terhadap pemerintah dan resistensi terhadap tirani karena merasa terdiskriminasi dan teralienasi. Aksi protes dan penolakan terhadap kebijakan-kebijakan kontroversial yang dihasilkan pemerintah. (Ghozali, 2019)

Sejatinya politik identitas harus dilebur menjadi politik kebangsaan yang berdasarkan kepada nilai-nilai kesetaraan, keadilan dan demokrasi. (Pertahanan, 2017) Karena spirit yang dibawa oleh politik kebangsaan ini berlandaskan Pancasila dan sebagai bentuk interpretasi dari politik kebhinekaan yang sarat akan persatuan dan kesatuan. (Andre Pebrian Perdana & Muslih, 2023). Jika nilai-nilai keadilan yang otentik mampu diimplementasikan dalam praktik politik elektoral, semua kecenderungan politik identitas negatif-destruktif yang dapat meruntuhkan bangunan bangsa dan negara akan dapat dicegah. (Maarif, 2010)

Kedua. Meningkatkan Budaya Toleransi di Ranah Politik Elektoral. Sistem demokrasi memberikan ruang kebebasan terhadap warga negara dalam menentukan afiliasi politiknya. Dalam teori sosial disebutkan sebagai struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*), struktur politik yang memberikan kebebasan dalam berpolitik. Namun, kebebasan disalah artikan oleh sebagian kelompok, sehingga menciptakan tindakan intoleran antar identitas kelompok dan elit-elit politik hingga berujung terjadinya kekerasan bernuansa SARA atas dasar kepentingan pragmatisme dan relasi kekuasaan. (Mohammad Iqbal Ahnaf, Samsul Arif, 2015) Fenomena ini di atas dipicu oleh sikap aktor yang telah mengkapitalisasi politik identitas menggunakan retorika provokatif dan menormalisasi kekerasan antar kelompok. (Mohammad Iqbal Ahnaf, Samsul Arif, 2015)

Oleh karena itu, membangun peradaban berkeadaban yang menghargai dan merawat multikulturalisme dan pluralisme merupakan tanggung jawab semua elemen. (Amal, 2018) Strategi yang dapat dilakukan untuk menciptakan hal tersebut adalah mengaktualisasikan nilai-nilai moderasi di ranah politik. Politik moderat memberikan konsep bahwa transformasi gerakan politik harus dibangun atas pondasi *huminitist interest*. Segala bentuk konflik sosial maupun politik harus diselesaikan dengan cara melihat paradigma kemanusiaan, kebangsaan dan pluralisme. (Amal, 2018) Toleransi politik

menuntut untuk memberikan ruang kebebasan berekspresi dan menyampaikan gagasan ataupun membantah kebijakan yang bertentangan dengannya. (Haas & Cunningham, 2014)

Meningkatkan toleransi politik merupakan salah satu solusi alternatif untuk mengakui eksistensi dan memberikan hak-hak politik masyarakat sipil. (Zhafira, 2017) Framing politik moderat akan menciptakan stabilitas politik nasional maupun lokal. Karena mengakui perbedaan status sosial, afiliasi politik, (George, 2017) mengakui hak-hak minoritas dan mewujudkan sistem demokrasi substansial. (Reyhan, 2022) Oleh karena itu, pemerintah sebagai lembaga pemberdayaan dan mengelola masyarakat, harus mengedepankan toleransi politik untuk menyikapi perbedaan pendapat dan cara pandang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ketika budaya toleransi politik diimplementasikan dalam praktek politik elektoral, akan meminimalisir terjadinya konflik bernuansa identitas. Karena bangsa ini akan tetap eksis ketika toleransi substansial dijadikan sebagai kompas dalam menyikapi perbedaan. (Maarif dkk., 2015)

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa *siyasad wasathiyah* merupakan konsep politik moderat yang dapat menjadi solusi bagi polarisasi politik di Indonesia. Dalam berbagai konteks, politik identitas yang berlebihan telah memicu perpecahan sosial dan mengancam stabilitas demokrasi. Konsep *siyasad wasathiyah* yang berlandaskan pada prinsip keseimbangan, keadilan, dan persatuan memiliki relevansi yang kuat dalam meredam ekstremisme politik serta menciptakan ruang demokrasi yang lebih inklusif. Penerapan *siyasad wasathiyah* dalam politik elektoral Indonesia memerlukan sinergi antara aktor politik, ulama, dan masyarakat sipil. Selain itu, penguatan pemahaman mengenai nilai-nilai moderasi politik melalui pendidikan dan kebijakan publik juga menjadi faktor kunci dalam membangun tatanan demokrasi yang lebih harmonis. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen kolektif dari seluruh elemen bangsa untuk menerapkan *siyasad wasathiyah* sebagai paradigma politik yang mendorong persatuan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam mendorong transformasi politik yang lebih moderat dan berkeadaban di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A Ilyas Ismail, Abuddin Nata, A. A. (2021). Konstruksi Moderasi Beragama Catatan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam A. S. & Abdallah (Ed.), *PPIM UIN Jakarta Gedung* (Nomor 5). PPIM UIN Jakarta.
- Aan Arizandy, Amirullah, Andi Muslimim, Cici Situmorang, Destara Sati, I. L. S. (2018). Merawat Kewarasan Publik: Refleksi Kritis Kader Intelektual Muda tentang Pemikiran Ahmad Syafii Maarif. Dalam *Buku*.
- Aan Arizandy, D. (2019). *Merawat Indonesia Refleksi Kritis Isu-Isu Keindonesiaan, Keislaman dan Keindonesiaan* (Moh. Shofan, Ed.; 1 ed.). MAARIF Institue For Culture and Humanity.
- Abdurrahman, L. T. (2022). Moderatisme sebagai Konsep Berkehidupan Bersama dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an Kontemporer. *Suhuf*, 15(1), 38. <https://doi.org/10.22548/shf.v15i1.692>
- Abon Ronaldi, & Bakti, A. F. (2023). Eksistensi Baitul Muslimin Indonesia Sebagai Organisasi Sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Kinerja Persuasi Politik. *Jurnal Politik Profetik*, 11(1), 59–66. <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i1a4>

- Al- Farisi, L. S. (2018). POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila. *Jurnal Aspirasi*, 2, 76.
- Al-Barbasy, M. M. (2022). *Indonesia Butuh Al-Siyasah Al-Wasathiyah*. REPUBLIKA.CO.ID.
- Al-Farisi, L. S. (2020). Politik identitas: Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara pancasila. *Aspirasi*, 10(2), 77–90.
- Al-Qur'an, L. P. M. (2011). Al-Qur'an dan Tafsirnya. Dalam *Widya Cahaya*, Jakarta. Depertemen Agama RI.
- Al-Rasyid, H. H. (2019). Radikalisme Berbasis Agama. Dalam *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Nomor 1). Alaudin University Press.
- Amal, M. K. (2018). *Membendung Arus Radikalisme Agama: Kontestasi Islam Moderat dan Islam Radikal* (Hafidz, Ed.; 3 ed.). STAIN Jember Press.
- Amrullah, A. M. K. (1971). *Tafsir Al-Azhar* (Vol. 1). PUSTAKA NASIONAL PTE LTD.
- Amrullah, A. M. K. (2019). Tafsir Al-Azhar. Dalam *PUSTAKA NASIONAL PTE LTD* (Vol. 9). PUSTAKA NASIONAL PTE LTD.
- Anam, H. F. (2019). Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia. *Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 2(2), 186. <https://doi.org/10.21043/politea.v2i2.5953>
- Andre Pebrian Perdana, & Muslih. (2023). Impact of Identity Politics in the Future 2024 General Elections. *Jurnal Kelitbangan: Inovasi Pembangunan*, 11(2), 226.
- Anugerah, B. (2021). Politik Aliran, Sirkulasi Elit, dan Pilpres 2024. *LUSOR Analysis*, 3. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23114.08647>
- Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 43–63.
- Arif, S. (2018). *Islam, Pancasila dan Deradikalisasi Meneguhkan Nilai Keindonesiaan* (1 ed.). PT Elex Media Komputindo.
- Bistara, R., & Fuady, F. (2022). Islam Wasathiyah dalam Gagasan Politik Islam: Menguak Pemikiran Islam Wasathiyah Abdurrahman Wahid. *Vox Populi*, 5(2), 209. <https://doi.org/10.24252/vp.v5i2.33423>
- Christian Siregar. (2014). Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia. *Humaniora*, 5(1), 109.
- Damanhuri Fattah. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawl. *Jurnal TAPIs*, 9(2), 43.
- Democracy Index 2023*. (2023). Economist Intelligence Unit (EIU).
- Dinamika Politik Identitas di Pemilu Indonesia*. (2023). LSI.
- Febriansyah, B. A., Manando, I., & Kusuma, A. W. (2022). Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama. *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 104. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2769>
- George, C. (2017). *Pelintiran Kebencian (Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi)* (1, Ed.; Nomor June). Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD).
- Gerald, G. (2019). Ideology and Political Parties: Measuring the Political Ideology of Marhaenism in PDIP, Democratic Socialism in PSI and Islamic Fundamentalism in PKS. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 135. <https://doi.org/10.15575/politicon.v1i2.6268>
- Ghozali, M. S. A. & Moh. H. (2019). *Peta Kuasa Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia Laporan Studi Literatur 2008-2018* (1 ed.). INKLUSIF.

- Haas, I. J., & Cunningham, W. A. (2014). The uncertainty paradox: Perceived threat moderates the effect of uncertainty on political tolerance. *Political Psychology*, 35(2), 291. <https://doi.org/10.1111/pops.12035>
- Hak dan keadilan dalam hubungan internasional_ 3.* (t.t.).
- Halim, A., Hosaini, H., Zukin, A., & Mahtum, R. (2022). Paradigma Islam Moderat Di Indonesia Dalam Membentuk Perdamaian Dunia. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(4), 708. <https://doi.org/10.59004/jisma.v1i4.239>
- Hamdi, A. Z. H. & (Ed.). (2017). *Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia* (1 ed.). Daulat Press Jakarta.
- Hariyanto, D., Dharma, F. A., & Rodiyah, I. (2025). Komodifikasi Agama Dalam Politik Identitas. *Umsida Press*, 1–90.
- Hayat, N., & Nurhakki, N. (2022). Religion Identity And Political Polarization: How Does Labeling Make It Worst? *Palita: Journal of Social Religion Research*, 7(1), 59. <https://doi.org/10.24256/pal.v7i1.2715>
- I Putu Sastra Wingarta, Berlian Helmy, Dwi Hartono, I Wayan Mertadana, & Reda Wicaksono. (2021). The Influence of Identity Politics on Indonesian Democracy. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 121. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419>
- Idham, I., & Pranowo, S. A. (2020). Pilkada, Politik Identitas Dan Kekerasan Budaya. *Jurnal Renaissance*, 5(02), 650–656.
- Ihsan, A. B., & Nurhayati, C. (2020). *Agama, Negara dan Masyarakat: Tokoh Agama ditengah Politik Identitas Warga Kota*.
- Iskandar, J., & Octo. (2024). Politik identitas dan alat pemenangan kontestasi dalam Pemilu yang akan mendatang. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(10), 3.
- Jubba, H., Rafi, M., & Qodir, Z. (2021). Politik identitas Melayu Islam sebagai upaya mewujudkan budaya berintegritas. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 88–110.
- Karim, A. G. (2019). Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 216–217. <https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.200-210>
- Kemenag. (2019). *Kumpulan Tulisan Para Penggerak Moderasi Islam* (D. S. R. dan M. Syafaat, Ed.; 1 ed.). Deirektorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Bimas Islam Kemenag.
- Kemenag RI. (2010). *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kewuel, H. K., Budiyo, A., Fajar, Y., & Kumoro, N. B. (2017). *Seri Kebudayaan I: Pluralisme Multikulturalisme dan Batas-batas Toleransi* (D. Hipolitus K. Kewel, Ed.). Program STudi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya.
- Khoirunnisa. (2023). Pemilu Dan Politik Identitas: Dilema Antara Kebangsaan Dan Keagamaan. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 9(1), 39. <https://doi.org/10.52447/polinter.v9i1.6999>
- Kholil, M. (2022). *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar PERGOLAKAN PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PEREBUTAN KEKUASAAN Studi atas Peta Kekuatan Politik Islam di Indonesia pada Era Reformasi*. IAIN Pekalongan.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Dalam Departemen Agama RI. Depertemen Agama RI.
- Laporan Indeks Toleransi Politik Indonesia*. (2022). Setara Institute.

- Latief, M. (2017). Islam dan Sekularisasi Politik di Indonesia. *Tsaqafah*, 13(1), 6. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.974>
- Lay, C. (2006). *Involusi politik: Esei-esai transisi Indonesia* (N. B. Umi Lestari, Ed.; I). Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM.
- Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia. *Simulacra*, 2(1), 31–37.
- Lestari, Y. S. (2018). Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama. *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2769>
- Maarif, A. S. (2010). Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Dalam H. Mubarak (Ed.), *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita* (1 ed., hlm. 18). Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Wakaf Paramadina.
- Maarif, A. S. (2018). *Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam* (1 ed.). PT. Benteng Pustaka.
- Maarif, A. S., Saifuddin, L. H., Abdullah, M. A., Anwar, S., Azra, A., Ilyas, H., Baidhawiy, Z., Latief, M. A. H., Qodir, Z., Tafsir, M., Riyadi, H., AR, M. S., Biyanto, Latif, Y., Dzuhayatin, S. R., & Wahid, W. G. A. (2015). *Fikih Kebinekaan* (M. A. D. dan A. F. F. Wawan Gunawan, Ed.; 1 ed.). PT Mizan Pustaka.
- Madjid, N. (1988). *Islam Kemodrenan dan Keindonesiaan*. Mizan.
- Mansurni Abadi, Cenruang Alung, Iman Permadi, & Yana Schova. (2023). Strategi Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Sebelum Dan Sesudah Pemilu. *Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(2), 152. <https://doi.org/10.46874/tkp.v4i2.721>
- Mansyur, I. C. (2023). Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka. *Jurnal Politik Profetik*, 11(1), 9. <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i1a1>
- Mohammad Iqbal Ahnaf, Samsul Arif, B. A.-A. & M. A. (2015). *Politik Lokal dan Konflik Keagamaan :Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik Dalam Konflik Keagamaan di Sampang, Bekasi dan Kupang*. Center for Religius & Cross-cultural Studies UGM.
- Muhammad Nur Rifqi Fuadi, & Saloom, G. (2020). Persepsi Keterancaman, Fundamentalisme dan Kebencian terhadap Intoleransi Politik. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 11(2), 58. <https://doi.org/10.29080/jpp.v11i2.428>
- Mu'ti, A. (2019). *Toleransi Yang Otentik: Menghadirkan Nilai Kemanusiaan dan Keterbukaan Beragama, Berpolitik dan Peradaban Sosial* (1 ed.). Al-Wasat Publishing House.
- Nawawi, A. M. N. (2019). Dakwah Islam Moderat dan Realitas Politik Identitas dalam Masyarakat Meme. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 69–92.
- Nugraha, F. (2018). Gerakan Ekonomi Keagamaan dan Politik Identitas Muslim Pedesaan: Studi di BMT Dana Akhirat Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. *Jurnal Bimas Islam*, 11(4), 693–722.
- Nur, F. S. (2010). Fikih Sirah: Hikmah Tersirat Dalam Lintal Sejarah Hidup Rasulullah Saw. Dalam *Fikih Sirah: Hikmah Tersirat Dalam Lintal Sejarah Hidup Rasulullah Saw* (1 ed., hlm. 70). PT. Mizan Publika.
- Ozi Setiadi, Anis Kurniawan, D. W. (2019). *Merawat Pemikiran Buya Syafii: Keislaman, Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (1 ed., Vol. 1). MAAROF Institute for Culture and Humanity.
- Pertahanan, M. I. K. (2017). *Memperkokoh identitas nasional untuk meningkatkan nasionalisme* (Vol. 69, Nomor 53). Puskom Publik Kemhan.
- PKS. (2024). *PKS - Global Day, Flashmob PKS Sumbar Suarakan Solidaritas untuk Palestina*. Dewan Pengurus Pusat PKS.

- Qorib, M. (2019). *Pluralisme Buya Syafii Marif (Gagasan dan Pemikiran Sang Guru Bangsa)* (A. & Gunawan, Ed.; 1 ed.). BUILDING.
- Rahawarin, Z. A. (2022). *Dinamika Partai Politik Islam di Indonesia* (S. Ernas, Ed.; i ed.). Pustaka Belajar.
- Rahman, M. T. (2013). *Politik identitas Islam di Indonesia: Menelusuri Politik Kebangsaan dan Politik Ekonomi Islam di Indonesia*.
- Rahman, M. T. (2020). *Agama dan politik identitas dalam kerangka sosial*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rambe, T., & Mayasari, S. (2022). Politik Identitas Dan Krisis Identitas: Mengungkap Realitas Praktek Politik Di Indonesia. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 8(1), 97. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i1.5608>
- Reyhan, E. (2022). Toleransi Politik Dan Kontrol Sosial (Studi Atas Konsepsi Dan Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia [KNPI] Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Dalam *Repository.Uinjt.Ac.Id*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Sajiwa, B., Syawaludin, M., & Guna, L. A. (2022). Politik Kebudayaan Zuriat Kiyai Marogan Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Budaya Di Pulau Kemaro. *Ampera: A Research Journal On Politics And Islamic Civilization*, 3(03), 174–183.
- Saputro, A. (2018). Agama dan Negara: Politik identitas menuju Pilpres 2019. *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, 2(2), 111–120.
- Setyawan, F. A. (2019). *Mahfud MD Sebut Politik Identitas Ancam Keutuhan Bangsa*. CNN Indonesia.
- SHIHAB, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesan Keserasian Al-Qur'an* (jilid 2). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2009). *Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Dalam *Lentera Hati* (Vol. 3). Lentera Hati.
- Silva, G. da. (2021). *Catatan Kritis George da Silva: Politik Martabat Identitas dan Kebencian* (1 ed.). Intelgensia Media.
- Sugiharto, J. and M. H. (2017). Kaleidoskop 2017: Pilkada Brutal Gubernur DKI Jakarta. Dalam *Tempo*.
- Suhendar. (2024). *Ustaz Adi Hidayat Beri Dukungan dan Doa untuk Anies Baswedan, Beberkan Makna di Balik Kata "Anies."* Jabar VIVA.
- Tjahjoko, G. T. (2015). *Politik Ambivalensi: Nalar Elite di Balik Pemenangan Pilkada* (U. N. Ni'mah, Ed.; 1 ed.). PolGov.
- Tutukansa, A. F. (2022). Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 14(1), 20. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol14.iss1.art3>
- Wahdini, M. (2020). Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(1), 51–66.
- Watihellu, D. (2019). *Nasionalis Religius Vs Nasionalis Sekuler di Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019*. TARGETINDO.
- Widjaja, P. S., Wibowo, D. P. A., & Geovasky, I. (2021). IDENTITY POLITICS AND PANCASILA-BASED RELIGIOUSITY IN THE PUBLIC SPHERE. *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian*, 6(1), 101–102. <https://doi.org/10.21460/gema.2021.61.658>
- Young, I. M. (1990). *Justice and The Politics of Difference*. Princenton University Press.

- Yunus, F. M., Yasin, T. H., & Rijal, S. (2023). Politik Identitas dan Politisasi Agama dalam Konteks Pemilu di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 9(September), 125.
- Yusuf, T., & Hidayah, M. (2024). Islam Dan Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024. *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, 7(2), 275. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1163>
- Zhafira, A. (2017). Efek moderasi kepercayaan politik terhadap hubungan antara religiusitas Islam dan intoleransi politik. *Jurnal Psikologi Sosial*, 15(2), 123. <https://doi.org/10.7454/jps.2017.11>